

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. INFORMASI BERKALA

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1.	Visi Misi	Memuat Visi dan Misi DINAS SOSIAL : "Terwujudnya Pelayanan Prima dan Ketahanan Sosial Menuju Kemandirian Masyarakat"	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/26 Agustus 2021	Softcopy dan hardcopy	3 Tahun	http://dinsos.kepulauanse-layarkab.go.id/#
2.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Sub Bagian 5. Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	Benteng/Januari 2023	Softcopy dan hardcopy	3 Tahun	http://dinsos.kepulauanse-layarkab.go.id/#
3.	Anjab/ABK	Dokumen yang memuat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja DINAS SOSIAL Tahun 2023	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	Benteng/Agustus 2023	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1puY_n cXtC1OL5qpjiSKDVSgHta7k Ta?usp=drive link
4.	DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/Januari 2024	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/115q7t36ET2DulBOePD-49k2eqtHbRtV5?usp=drive link

5.	Cascading tahun 2023	Penjabaran dan penyeragaman sasaran strategis (SS)m Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level rendah	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/ Desember 2023	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/12GH5Y5o6y8CMrV0zStsrL01u8x35N3?usp=drive_link
6.	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/februari 2024	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1PdmyF_gHyGm2XcJTioS1imAE7SmaoYD?usp=drive_link
7.	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS SOSIAL 2023 berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban DINAS SOSIAL yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/Februari 2024	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1ptwhtQ40BvmgyiWq0ddyIldorhqJAtN8?usp=drive_link
8.	Renstra 2021-2026 DINAS SOSIAL	Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/22 September 2021	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1QWFuOPyC240zE-Aw82Jq8PLLZkOIQG?usp=sharing
9.	Rencana Aksi 2023	Memuat sasaran strategis dan focus kegiatan prioritas Dinas Sosial	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/Januari 2023	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1v6cqF-b386paVofNOudvvg1cGAPv1mq?usp=drive_link

10.	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial (IKU)	Memuat sasaran strategis, target sebagian pengukuran kinerja yang telah direncanakan baik pada rencana strategis (Renstra) Tahunan serta sebagai evaluasi kerja dinas sosial	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/Januari 2023	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1zRr7tiD6Qx5zNdLIXCZZjIX28vuPHUHV?usp=drive_link
11.	LKPJ	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan good governance sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/Februari 2024	Softcopy dan hardcopy	3 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1tNPjDps2xAvfj1kHEG8j7YVOFPX-ROZO?usp=drive_link
12.	LPPD	memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2022	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/Februari 2024	Softcopy dan hardcopy	3 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1Zy2sliUEI_YuM2WtwlxehW4r5vf3CrxL?usp=drive_link
13.	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023	Memuat beberapa komponen penilaian kinerja, tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya dan nilai hasil evaluasi kinerja	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/Februari 2024	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1u5lw_W3xCQ3NgGT5TkZyAyCCqKOuqmR?usp=drive_link

B. INFORMASI SERTA MERTA

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1					
2	N	I	H	I	L
3					

C. INFORMASI SETIAP SAAT

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	Renstra 2021-2026 DINAS SOSIAL	Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis	Kepala Sub Bagian Program	Benteng/22 September 2021	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1QWF_uOPyC240zE-Aw82_Jq8PLLZkOIQG?usp=sharing

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS SOSIAL

TAHUN 2024

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>Dokumen Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Keuangan : <ul style="list-style-type: none"> SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya Surat pencairan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan D7 (2) 	<ul style="list-style-type: none"> Mengantisipasi Proses Penegakan Hukum Menjaga kepentingan perlindungan hak 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Selama masih berlaku Selama masih berlangsung penyelenggaraannya selama status perlindungan masih berlaku
Laporan Keuangan sebelum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf g, huruf l, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)	Sampai terbitnya Laporan Keuangan yang telah di audit

Laporan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	Selama Masih Berlaku
Disposisi surat pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Arsip dokumen kepegawaian Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin Identitas PNS yang mengajukan izin 	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
Data BNBA Anak Bermasalah Hukum (ABH)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap Identitas dan Masalah yang dihadapi oleh Anak tersebut yang bersifat rahasia pribadi	Untuk melindungi privasi ABH dan terkait psikososial anak.	Setelah mendapat izin dari yang bersangkutan

Data Disabilitas (ODGJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap Identitas ODGJ. Akan berdampak Psikososial terhadap Keluarga	Untuk menghindari stigma negative dari masyarakat.	Setelah mendapat ijin dari keluarga yang bersangkutan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalam terdapat data –data Penerima Bantuan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Pemberian Iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap Data Pribadi DTKS	Untuk menghindari hal-hal yang berdampak data pribadi Penerima Program	Setelah mendapat ijin dari keluarga yang bersangkutan

Parappa, 14 Maret 2024

Kepala Dinas,


Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P

Pangkat, Pembina Tk. I

NIP. 19730217 199803 2 011